

Pemerintah Kabupaten Jombang



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Bupati R. Soedirman No. 92 Jombang 61419

Telp. (0321) 879913



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JI. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419 Telp. 0321879913 fax. 0321 879913 Email: diskominfo@iombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 188/668/415.23/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika:
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan menetapkannya dalam Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

- 1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
- 2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
- 3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
- 4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT: Membebankan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : 19 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JOMBANG

BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 19741001 199901 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1.Sdr.Kepala BAPPEDA Kab. Jombang

2.Sdr.Kepala BPKAD Kab. Jombang

3.Sdr.Inspektur Kab. Jombang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 188/ 668 /415.23/2022 TANGGAL : 19 Juli 2022

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA **TAHUN 2022**

Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretaris	Perencana Ahli Muda,
Anggota	Sekretaris Dinas Kominfo
	Kabid Hubungan Masyarakat dan
	Komunikasi Publik,
	Kabid Aplikasi Teknologi Informasi
	Kabid Statistik dan Persandian

Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : 19 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP: 19741001 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419 Telp. 0321879913 fax. 0321 879913 Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

NOMOR: 188/669/415.23/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN **INFORMATIKA**

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Perubahan Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja) Kabupaten Jombang Tahun 2022, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan indikator kinerja SKPD sesuai tugas dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tentang Perubahan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Rencana Kabupaten Jombang Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 2004 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 33 2004 5. Undang-Undang Nomor Tahun Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan

dokumen perencanaan untuk tahun 2022.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah

sesuai perkembangan pembahasan.

KEEMPAT : Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 dapat berubah sesuai

pengalokasian anggaran.

KELIMA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun

2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : 19 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang

- 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Jombang
- 3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Jombang
- 4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022.

DINAS KO

Jombang, 19 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN IOMBANG

02

LUDI WUYARNO, ST. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAI	HUN
2022	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	[
Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi	43
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan	49
BAB IV PENUTUP	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Renja Tahun 2022 adalah sebuah dokumen perencanaan sampai periode satu tahun 2022 dengan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah, sebagai satu kesatuan dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional,

dokumen perencanaan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Renja Tahun 2022 Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Perubahan Renja Tahun 2022 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD sebagai instansi yang baru. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Perubahan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan dan tupoksi sebagai berikut:

a. Urusan

1. Perumusan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

- 2. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- 4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta menyelenggarakan fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 6. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 7. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan

8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan riil penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu antara lain pada:

- Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan

4

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
- 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

a. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan. Perubahan Renja Tahun 2022 dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsinya sampai dengan periode tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah :

- 1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

4. Untuk menjamin tercapainya penggunaaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

b. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja PD, keterkaitan antara Perubahan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Bab ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

7

Bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2022 dengan mengacu pada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan adanya kendala, hambatan maupun arahan kebijakan pusat/provinsi/daerah yang ada sampai dengan triwulan II tahun 2022. Dari hasil penelaahan tersebut, dijelaskan usulan upaya tindak lanjutnya. Upaya tindak lanjut yang dilaksanakan diharapkan dengan mendorong peran serta masyarakat. (Hibah Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, gaji dan TPP) ditampilkan sebagaimana laporan triwulanan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKK.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDG's (Sustainble Development Goals);
- 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;

- 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2022.
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bagian ini diuraikan hasil kajian atas perubahan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah lain, berdasarkan surat usulan perubahan, hasil evaluasi dan pengumpulan informasi PD, maupun hasil rapat koordinasi.

Deksripsi yang disajikan dalam sub bab ini antara lain:

- Penjelasan tentang proses bagaimana perubahan usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- Penjelasan kesesuaian perubahan usulan tersebut dikatkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
 Bab ini menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap perubahan
 kebijakan nasional dan provinsi sampai dengan triwulan II,
 khususnya yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
 pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas
 pokok dan fungsi PD.
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 Bab ini memuat perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas
 rumusan perubahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
 fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target
 kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

- a. Bab ini berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan progam, kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya terkait dengan :
 - Pencapaian target visi, misi dan indikator kinerja jangka menengah (IKU dan IKD);
 - Pemulihan dampak covid 19;
 - Pencapaian SDGs;
 - Pengentasan Kemiskinan;
 - Pencapaian SPM;
 - Pengembangan Kawasan strategis dan cepat tumbuh;
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, khususnya yang berbasis agribisnis;
 - Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah (Penanganan Wabah PMK, Percepatan infrastruktur, Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata);
 - Hasil Evaluasi Pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan
 II.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain meliputi:
 - Perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan;
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
 - Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos/gaji/TPP disajikan dalam tabel form lampiran 3

Penambahan penjelasan jika rumusan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD, baik jenis

10

program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Form Lampiran 3

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat .

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya;
- b) Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c) Rencana Tindak Lanjut

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2022 dengan mengacu pada APBD tahun 2022, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.726.512.917 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.660.931.408 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) atau sebesar 40,44%. Secara rinci pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

N o	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan			ada Tahun 2023 stra Perangkat 1)		si Capaian Kin Renja PD Tahur	erja Rentra PD 1 Lalu (2021)			ggaran Renja PD dievaluasi (2022)	Real	isasi Kinerja II	pada Triwulan			n Kinerja dan ang dievaluasi 2)	Ting Capa Kinerj Reali Angg Renja 2022	aian ja dan isasi garan Tahun	Anggara	si Kinerja dan In Renstra s/d Inun 2022	Tingkat Ca Kinerja Realisa Anggar Renstra P Tahun 202	dan asi an 'D s/d	Ket (Permasalaha n dan Solusi)
1	2	3	4		5			6			7			8			12		13=12/		14	4=6+12	14=13/5 x	100%	15
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Irusan I	Komunikasi da	an Informatika																							
n A K	Meningkatka n kualitas Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	200	%	24,050,017,64 6	100	%	9,396,243,11 6	100	%	7,212,106,567	24	%	3,434,412,83 4	24	%	3,434,412,83 4	24	28	100%	12,830,655,95 0	100%	47 %	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200	%	40,335,150	100	%	24,172,500	100	%	2,650,000	37	%	1,643,750	37	%	1,643,750	37	0	100%	25,816,250	100%	60 %	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	6	dokumen	21,833,500	3	dokumen	11,575,000	3	dokumen	1,475,000	43	%	843,750	43	%	843,750	43	0	3 dokumen	12,418,750	3 dokumen	53 %	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	10	laporan	18,501,650	5	laporan	12,597,500	5	laporan	1,175,000	21	%	800,000	21	%	800,000	21	0	5 laporan	13,397,500	5 laporan	68 %	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	200	%	15,159,317,56 0	100	%	5,013,227,85 2	100	%	5,043,116,104	16	%	2,227,536,50 9	16	%	2,227,536,50 9	16	24	100%	7,240,764,361	100%	41 %	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	28	kali	14,458,698,56 0	14	kali	4,795,738,35 2	14	kali	4,831,480,104	14	kali	2,314,245,48 2	14	kali	2,314,245,48 2	14	24	14 kali	7,109,983,834	14 kali	41 %	
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	22	kegiatan	690,004,000	11	kegiatan	211,862,000	11	kegiatan	211,356,000	2	kegiata n	93,291,027	2	kegiata n	93,291,027	2	17	11 kegiatan	305,153,027	11 kegiatan	36 %	

N o	Sasaran	Pro	gram/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan			ada Tahun 2023 stra Perangkat 1)	Realisa s/d F	asi Capaian Kin Renja PD Tahur	erja Rentra PD ı Lalu (2021)			ggaran Renja PD lievaluasi (2022)	Reali	sasi Kinerja II	pada Triwulan			n Kinerja dan ang dievaluasi ²)	Cap Kinerj Real Angg	gkat paian ja dan lisasi garan Tahun 2 (%)	Anggara	si Kinerja dan an Renstra s/d hun 2022	Tingkat Ca Kinerja (Realisa Anggar Renstra P Tahun 202	dan asi an D s/d	Ket (Permasalaha n dan Solusi)
1	2		3	4		5			6			7			8			12		13=12/	2/7x100 %	1	4=6+12	14=13/5 x	100%	15
						K	Rp		K	Rp		К	Rp		K	Rp		K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	2	dokumen	10,615,000	1	dokumen	5,627,500	1	dokumen	280,000	16,0 9	%	0	16,0 9	%	0	16,0 9	0	1 dokumen	5,627,500	1 dokumen	53 %	
		Kep	ninistrasi oegawaian angkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	200	%	4,550,000,000	100	%	3,422,818,07 0	100	%	1,000,000,000	57	%	799,648,000	57	%	799,648,000	57	75	100%	4,222,466,070	100%	92 %	
		1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang- undangan di bidang cukai	900	orang	4,550,000,000	450	orang	3,422,818,07 0	450	orang	1,000,000,000	57	%	799,648,000	57	%	799,648,000	57	75	450 orang	4,222,466,070	450 orang	92 %	
			ninistrasi Umum angkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200	%	791,402,360	100	%	248,246,469	100	%	251,851,725	20	%	75,520,261	20	%	75,520,261	20	5	100%	323,766,730	100%	33 %	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	6	lokasi	37,784,460	3	lokasi	7,075,500	3	lokasi	13,827,125	30	%	2,451,600	30	%	2,451,600	30	0	3 lokasi	9,527,100	3 lokasi	19 %	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	6	lokasi	147,577,700	3	lokasi	32,102,200	3	lokasi	64,215,500	20	%	23,373,500	20	%	23,373,500	20	20	3 lokasi	55,475,700	3 lokasi	30 %	
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	4	jenis	363,354,000	2	jenis	142,678,821	2	jenis	113,781,300	30	%	27,593,661	30	%	27,593,661	30	0	2 jenis	170,272,482	2 jenis	39 %	
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	8	jenis	117,165,200	4	jenis	34,340,000	4	jenis	31,094,800	25	%	11,330,000	25	%	11,330,000	25	0	4 jenis	45,670,000	4 jenis	29 %	

N o	Sasaran	Pro	gram/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target (Akhi	Renstra PD pa r Periode Rens Daerah	ada Tahun 2023 stra Perangkat s)		ısi Capaian Kir Renja PD Tahuı	nerja Rentra PD n Lalu (2021)			ggaran Renja PD lievaluasi (2022)	Realis	sasi Kinerja II	pada Triwulan			n Kinerja dan ang dievaluasi)	Ting Capa Kinerj Reali Angg Renja 2022	aian a dan sasi aran Tahun	Anggara	si Kinerja dan an Renstra s/d hun 2022	Tingkat Ci Kinerja Realis Angga Renstra F Tahun 20	dan asi ran PD s/d	Ket (Permasalaha n dan Solusi)
1	2		3	4		5			6			7			8			12		13=12/ %		1	4=6+12	14=13/5 x	100%	15
						К	Rp		К	Rp		К	Rp		K	Rp		K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	
				Jumlah pemenuhan barang penggandaan	2	jenis		1	jenis		1	jenis		25	%		25	%		25		1 jenis		1 jenis		
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	6	media	30,832,000	3	media	9,350,000	3	media	9,916,000	7	%	3,275,000	7	%	3,275,000	7	0	3 media	12,625,000	3 media	30 %	
		6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	kali	94,689,000	3	kali	22,699,948	3	kali	19,017,000	30	%	7,496,500	30	%	7,496,500	30	0	3 kali	30,196,448	3 kali	24 %	
		Pen	yediaan Jasa unjang Urusan nerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	200	%	1,526,163,300	100	kali	398,335,795	100	%	547,115,100	30	%	245,640,143	30	%	245,640,143	30	0	100%	643,975,938	100%	26 %	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	6	lokasi	694,000,000	3	lokasi	178,821,145	3	lokasi	228,000,000	25	%	118,667,618	25	%	118,667,618	25	0	3 lokasi	297,488,763	3 lokasi	26 %	
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	10	jenis	832,163,300	5	jenis	219,514,650	5	jenis	319,115,100	29	%	126,972,525	29	%	126,972,525	29	0	5 jenis	346,487,175	5 jenis	26 %	
		Mili Pen	neliharaan Barang k Daerah unjang Urusan nerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	200	%	927,142,188	100	%	289,442,430	100	%	367,373,638	32	%	84,424,171	32	%	84,424,171	32	3	100%	373,866,601	100%	32 %	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2	unit	223,377,050	1	unit	71,310,630	1	unit	83,160,000	28	%		28	%	33,341,471	28	0	1 unit		1 unit	32 %	
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	2	unit		1	unit	71,310,030	1	unit		35	%	33,341,471	35	%		35		1 unit	104,652,101	1 unit		

N o	Sasaran	Pro	gram/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan			ada Tahun 2023 stra Perangkat n)		si Capaian Kin Renja PD Tahur	erja Rentra PD n Lalu (2021)			ggaran Renja PD lievaluasi (2022)	Reali	sasi Kinerja II	pada Triwulan			n Kinerja dan ang dievaluasi ²)	Cap Kiner Real Angg	garan Tahun	Anggara	si Kinerja dan an Renstra s/d hun 2022	Tingkat Ca Kinerja Realisa Anggar Renstra P Tahun 202	dan asi an 'D s/d	Ket (Permasalaha n dan Solusi)
1	2		3	4		5			6			7			8			12		13=12	//7x100 %	1	4=6+12	14=13/5 x	100%	15
						K	Rp		К	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	34	unit	105,050,000	17	unit	7,466,800	17	unit		28	%		28	%	793,000	28	0	17 unit	8,259,800	17 unit		
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasiona I dibayarkan pajaknya	34	unit		17	unit		17	unit	13,000,000	35	%	793,000	35	%		35		17 unit		17 unit	7%	
		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	4	lokasi	163,038,138	2	lokasi	29,457,000	2	lokasi	83,261,638	25	%	38,769,700	25	%	38,769,700	25	0	2 lokasi	68,226,700	2 lokasi	18 %	
		4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	6	lokasi	435,677,000	3	lokasi	181,208,000	3	lokasi	187,952,000	35	%	11,520,000	35	%	11,520,000	35	5	3 lokasi	192,728,000	3 lokasi	44 %	
2	Meningkatka n kualitas layanan publik dibidang Kominfo	INF KO	OGRAM ORMASI DAN MUNIKASI BLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	123	I-PIKP	6,566,625,900	81,6	(sedang)	3,137,942,45 3	62	(sedang)	1,348,453,500	30	%		30	%		30	30	81,6		81,6	54 %	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	168	IKM		85,81	baik		84,5	(baik)		20	%	901,738,000	20	%	901,738,000	20		85,81	4,039,680,453	85,81		
		Info Kor Per	gelolaan ormasi dan nunikasi Publik nerintah Daerah oupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	200	%	6,566,625,900	100	%	3,137,942,45 3	100	%	1,348,453,500	33	%	901,738,000	33	%	901,738,000	33	30	100	4,039,680,453	100	54 %	
		1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	10	media	1,522,692,900	5	media	776,491,000	5	media	229,420,400	41	%	86,433,000	41	%	86,433,000	41	6	5	862,924,000	5	52 %	

N o	Sasaran	Pro	gram/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Renstra PD pa r Periode Rens Daerah			ısi Capaian Kin Renja PD Tahuı	nerja Rentra PD n Lalu (2021)			ggaran Renja PD iievaluasi (2022)	Realis	sasi Kinerja II	pada Triwulan			n Kinerja dan ang dievaluasi ?)	Cap Kinerj Real Angg Renja 2022	ja dan isasi garan Tahun 2 (%)	Anggara	si Kinerja dan In Renstra s/d nun 2022	Tingkat Ca Kinerja (Realisa Anggar Renstra P Tahun 202	dan ısi an D s/d	Ket (Permasalaha n dan Solusi)
1	2		3	4		5			6			7			8			12		13=12/ 9	/7x100 %	14	4=6+12	14=13/5 x	100%	15
						К	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah program siaran radio per minggu	14	program		7	program		7	program		25	%		25	%		25		7		7		
		2	Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	200	%	388,757,500	100	%	160,534,250	100	%	61,868,600	10	%		10	%		10	0	100		100	41 %	
				Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	200	%		100	%		100	%		33	%	11,536,000	33	%	11,536,000	33		100	222,402,850	100		
				Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	10	desa		5	desa		5	desa		0	%		0	%		0		5 desa		5 desa		
		3	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	90	mitra kerjasama	4,655,175,500	45	mitra kerjasama	2,200,917,20 3	45	mitra kerjasama	1,057,164,500	51	%	803,769,000	51	%	803,769,000	51	37	45 mitra kerjasam a	3,004,686,203	45 mitra kerjasam a	56 %	
				Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	25,00 0	pengikut		12.00 0	pengikut		13,00 0	pengikut		28	%		28	%		28		12.000 pengikut		12.000 pengikut	•	
3	Meningkatka n kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE		OGRAM APLIKASI ORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 4	indikator terkelola	10,192,143,95 0	2	Level	3,798,316,68 7	2	level	2,893,203,850	16	%	315,450,574	16	%	315,450,574	16	5	level 2	3,798,316,687	level 2	39 %	
	OI DE			Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	36	indikator terkelola		18	indikator terkelola		18	indikator terkelola		39	%		39	%	, ,	39		18 indikator terkelola	., .,,,	18 indikator terkelola		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan			ada Tahun 2023 stra Perangkat n)		asi Capaian Kin Renja PD Tahur	nerja Rentra PD n Lalu (2021)			ggaran Renja PD lievaluasi (2022)	Reali	isasi Kinerja II	pada Triwulan			n Kinerja dan ang dievaluasi 2)	Reali Angg Renja 2022	aian a dan isasi jaran Tahun ! (%)	Anggara	si Kinerja dan an Renstra s/d hun 2022	Tingkat Ca Kinerja Realisa Anggar Renstra P Tahun 202	dan asi ran PD s/d	Ket (Permasalaha n dan Solusi)
1	2	3	4		5			6			7			8			12		13=12/ %	7x100 6	1	4=6+12	14=13/5 x	100%	15
					К	Rp		К	Rp		К	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraa n Jaringan Intra Pemerintah Daerah	200	%	6,108,407,600			2,438,117,62 7	100	%	1,556,774,100	15	%	61,421,000	15	%	61,421,000	15	0	100%	2,499,538,627	100%	40 %	
			Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraa n Sub Domain	167	%		67	%		100	%		20	%		20	%		20		67%		67%		
		1 Penatalaksanaa n dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	107	subdomai n	65,280,000	43	Subdomai n	16,785,000	64	subdomai n	31,500,000	17	%	2,665,900	17	%	2,665,900	17	0	43 sub domain	19,450,900	43 sub domain	26 %	
		2 Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	136	titik	6,043,127,600	68	titik	2,421,332,62 7	100	68 titik	1,525,274,100	68	titik	61,421,774	20	%	61,421,774	68	0	68	2,482,754,401	68	40 %	
		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	40	%	4,083,736,350	20	%	1,360,199,06 0	20	%	1,336,429,750	39	%	254,028,800	39	%	254,028,800	39	11	25	1,614,227,860	25	37 %	
		1 Penatalaksanaa n dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	6	dokumen	325,431,650	4	dokumen	54,732,500	2	dokumen	57,977,000	31	%	2,665,900	31	%	2,665,900	31	0	4 dokumen	57,398,400	4 dokumen	17 %	

N o	Sasaran	Pro	gram/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		t Renstra PD pa ir Periode Rens Daerah			ısi Capaian Kir Renja PD Tahuı	nerja Rentra PD n Lalu (2021)			ggaran Renja PD ievaluasi (2022)	Reali	sasi Kinerja II	pada Triwulan			n Kinerja dan ang dievaluasi 2)	Ting Capa Kinerj Reali Angg Renja 2022	aian a dan sasi aran Tahun	Anggara	si Kinerja dan an Renstra s/d hun 2022	Tingkat Ca Kinerja Realis: Angga Renstra P Tahun 20:	dan asi ran PD s/d	Ket (Permasalaha n dan Solusi)
1	2		3	4		5			6			7			8			12		13=12/ %	7x100	1	4=6+12	14=13/5 x	100%	15
						К	Rp		К	Rp		К	Rp		K	Rp		K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	
		2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	45	%	1,743,064,000	20	%	652,733,280	25	%	621,995,000	44	%	10,112,900	44	%	10,112,900	44	0	20%	662,846,180	20%	37 %	
		3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	9	aplikasi	2,015,240,700	5	aplikasi	652,733,280	4	aplikasi	656,457,750	35	%	241,250,000	35	%	241,250,000	35	23	5 aplikasi	893,983,280	5 aplikasi	40 %	
			Liottoriiit	<u>I</u>			<u>I</u>					· I						Rata rata Cap	paian Kinerja (%)	59	63	100	20,668,653,09	100	114	
																			Predikat Kinerja							
			Urusan Statistik																							
	Meningkatka n Kualitas Layanan Publik di bidang Kominfo	PEI N S	OGRAM NYELENGGARAA ITATISTIK KTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	200	%	795,610,500	100	%	238,797,582	100	%	204,499,500	22	%	4.438.000	22	%	4.438.000	22	0	100%		100%	30	
				Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	7	(baik) IPP		3,164	IPP		3,52	IPP		22	%	4,430,000	22	%	4,430,000	22		3,164	243,235,582	3,164	%	
		Sta Lin	nyelenggaraan tistik Sektoral di gkup Daerah pupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	6	dokumen	795,610,500	3	dokumen	238,797,582	100	3 dokumen	204,499,500	24	%	4,438,000	24	%	4,438,000	24	0	3 dokume n	243,235,582	3 dokume n	30 %	
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	18	kali	567,512,000	9	kali	163,876,500	100	9 kali	153,073,000	7.5	%	2,328,000	7.5	%	2,328,000	7.5	0	9 kali	166,204,500	9 kali	29 %	
		2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	56	data sektoral	228,098,500	28	data sektoral	74,921,082	100	28 data sektoral	51,426,500	35	%	2,110,000	35	%	2,110,000	35	0	28 data sektoral	77,031,082	28 data sektoral	33 %	
									1	•		•						Rata rata Cap	paian Kinerja (%)		0	100	243,235,582	100	30	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		: Renstra PD pa r Periode Rens Daerah		Realisa s/d F	isi Capaian Kin Renja PD Tahun	erja Rentra PD n Lalu (2021)	Target Tahun	Kinerja dan Anq berjalan yang c	ggaran Renja PD ievaluasi (2022)	Reali	sasi Kinerja	pada Triwulan			n Kinerja dan ang dievaluasi 2)	Ting Capa Kinerj Reali Angg Renja 2022	aian a dan isasi Jaran Tahun	Anggara	si Kinerja dan nn Renstra s/d hun 2022	Tingkat Ca Kinerja Realisa Anggar Renstra P Tahun 202	dan asi an 'D s/d	Ket (Permasalaha n dan Solusi)
1	2	3	4		5			6			7			8			12		13=12/ %	/7x100	14	4=6+12	14=13/5 x	100%	15
					K	Rp		К	Rp		К	Rp		K	Rp		K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		Predikat Kinerja							
	an Persandian																								
5	Meningkatka n kualitas layanan publik dibidang Kominfo	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	75	%	380,442,500	50	%	82,363,910	75	%	68,249,500	25	%	4,892,000	25	%	4,892,000	25	0	50%	87,255,910	50%	22 %	
		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	75	%	380,422,500	50	%	82,363,910	75	%	68,249,500	25	%	4,892,000	25	%	4,892,000	25	0	50%	87,255,910	50%	22 %	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	5	sistem elektronik	380,422,500	3	sistem elektronik	82,363,910	2	sistem elektronik	68,249,500	10	%	4,892,000	10	%	4,892,000	10	0	3 sistem elektronik	87,255,910	3 sistem elektronik	22 %	
		1 1	1		<u> </u>			<u> </u>			I			I	1		Rata rata Cap	paian Kinerja (%)				87,255,910			
																		Predikat Kinerja							
						JUMLAH ANGO	SARAN DA	N REALISASI D	ARI SELURUH PF	ROGRAM		11,726,512,91 7			4,660,931,40 8			4,660,931,40 8	25	0					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2022, pelaksanaan indikator kinerja disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tupoksi sebagai berikut:

- 1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
 - Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra
 Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
 - Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang terhubung dengan akses internet dan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 61 OPD. Jaringan Intra Pemerintah Daerah menggunakan koneksi Fiber Optic (FO).
 - Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
 Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang yang menggunakan akses
 - internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 61 OPD. Desa dan Kecamatan menggunakan jaringan wireless. Bandwidth sebesar 600 MB untuk client, 200 MB untuk server, dan 200 MB
 - Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.
 - Penyediaan bandwith yang cukup untuk OPD yang bisa digunakan untuk akes internet, berbasis suara, video, teks data dan sinyal
- 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
 - Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015

Layanan public di Pemkab Jombang yang dimanfaatkan secara daring meliputi sebagai berikut :

- 1 Urus KTP dukcapil.jombangkab.go.id
- 2 SIRINDUNONA perizinan.jombangkab.go.id
- 3 Pendaftaran Online RSUD Jombang rsudjombang.jombangkab.go.id
- Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar

18 OPD yang memiliki web sesuai standart x 100% = 29.5% 61 OPD yang ada di Kabupaten Jombang

Saat ini situs web OPD di Kabupaten Jombang dengan subdomain namaopd.jombangkab.go.id dimiliki 18 OPD dari 61 OPD yaitu (1) bkd.jombangkab.go.id, bapenda.jombangkab.go.id, (2) (3)bappeda.jombangkab.go.id, (4) bpbd.jombangkab.go.id, (5) dpmptsp.jombangkab.go.id, (6) kominfo.jombangkab.go.id, (7) pertanian.jombangkab.go.id. (8) disdagrin.jombangkab.go.id. (9)(10)disnaker.jombangkab.go.id, pupr.jombangkab.go.id, (11)dlh.jombangkab.go.id, (12)dukcapil.jombangkab.go.id, (13)dinkes.jombangkab.go.id, inspektorat.jombangkab.go.id, (14)(15)rsudjombang.jombangkab.go.id, (16)ploso.jombangkab.go.id, (17)jdih.jombangkab.go.id, (18) sibaja.jombangkab.go.id.

OPD yang belum memiliki website sesuai dengan penamaan domain sesuai dengan PERMEN no 28 Tahun 2006 tentang domain go.id difasilitasi dalam portal website Pemkab Jombang dengan alamat www.jombangkab.go.id. Halaman website jombangkab memiliki halaman utama, terdapat pula subpage 61 OPD yang dikelola oleh masing-masing OPD Kabupaten Jombang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan
 Aplikasi umum dan khusus SIMDA integrated telah digunakan oleh 61 OPD sehingga tercapai 100%.
- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

20 layanan publik & administrasi pemerintahan x 100% = 55.56% 36 indikator dokumen SPBE

Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan tercapai 55,56%. Layanan SPBE yang tercantum sebagai berikut:

REKAPITULASI DATA LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SESUAI DOKUMEN PROSES BISNIS TAHUN 2022

No.	Aplikasi Fungsional	Ada/ Tidak Ada	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
1	2	3	4	5
I	LAYANAN PUBLIK			
1	Sistem Informasi Tenaga Kerja	Tidak Ada	-	-
2	Sistem Informasi Pendidikan	Tidak Ada	-	-
3	Sistem Informasi Kepemudaan	Tidak Ada	-	-
4	Sistem Informasi Kesehatan	Ada	SIMPUS	Dinas Kesehatan
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	Ada	SIM-PMKS	Dinas Sosial
6	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Ada	Website Blonjo	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Sistem Informasi Perindag	Ada	e-Katalog Harga Pangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	Sistem Informasi EXIM	Tidak Ada	-	-
9	Sistem Informasi Pertanian	Ada	Adaptif dan Simfoni	Dinas Pertanian
10	Sistem Informasi Peternakan	Tidak Ada	-	-
11	Sistem Informasi Perkebunan	Tidak Ada	-	-
12	Sistem Informasi Perikanan	Tidak Ada	-	-
13	Sistem Informasi Kehutanan	Tidak Ada	-	-
14	Sistem Informasi Tanam Pangan	Tidak Ada	-	-
15	Sistem Informasi Wisata dan Budaya	Ada	Jombang Travel	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16	Sistem Informasi Investasi	Tidak Ada	-	-
17	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Ada	SIPPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Sistem Informasi Pendayagunaan Air	Tidak Ada	-	-

19	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ada	NOC	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	Ada	Sistem Informasi Aset Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Sistem Informasi Energi Terbarukan	Tidak Ada	-	-
22	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Tidak Ada	-	-
II	Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Ada	SIMDA Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Sistem Informasi Pengadaan	Ada	LPSE, SIBAJA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Sistem Informasi Pembangunan	Ada	SIPPEM	Bagian Administrasi Pembangunan
5	Sistem Informasi Legislasi	Tidak Ada	-	-
6	Sistem Informasi Kearsipan	Tidak Ada	-	-
7	Sistem Informasi Kebencanaan	Ada	Sistem Pelaporan Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Sistem Informasi Pengawasan	Ada	SIMHPI	INSPEKTORAT
III	Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	Ada	JDIH	Bagian Hukum
2	Sistem Informasi Legislatif	Tidak Ada	-	-
IV	Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	Ada	SIMDA Integrated	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
v	Sistem Informasi Keuangan Daerah			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VI	Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada	SIAP ASN	Badan Kepegawaian Daerah,

		Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Jenis Layanan	36	
Layanan Tersedia	20	

• Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik

18/20 ×100% = 90%

DATA LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG SUDAH MEMANFAATKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK TAHUN 2022

No.	Aplikasi Fungsional	Sudah/ Belum	Nama Aplikasi	Unit Kerja/ Perangkat Daerah Pengelola
1	2		4	5
1	Sistem Informasi Kesehatan	Sudah	SIMPUS	Dinas Kesehatan
2	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	Sudah	SIM-PMKS	Dinas Sosial
3	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Sudah	Website Blonjo	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	Sistem Informasi Perindag	Sudah	e-Katalog Harga Pangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Sistem Informasi Pertanian	Sudah	Adaptif dan Simfoni	Dinas Pertanian
6	Sistem Informasi Wisata dan Budaya	Sudah	Jombang Travel	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Sudah	SIPPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	NOC	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	Sudah	Sistem Informasi Aset Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Belum	SIMDA Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Belum	SIMDA Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

12	Sistem Informasi Pengadaan	Sudah	LPSE, SIBAJA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13	Sistem Informasi Pembangunan	Sudah	SIPPEM	Bagian Administrasi Pembangunan
14	Sistem Informasi Kebencanaan	Sudah	Sistem Pelaporan Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Sistem Informasi Pengawasan	Sudah	SIMHPI	INSPEKTORAT
16	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	Sudah	JDIH	Bagian Hukum
17	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Sistem Informasi Kepegawaian	Sudah	SIAP ASN	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
	Jumlah Layanan Tersedia	20		
Layanan yang sudah menggunakan Sertifikat Elektronik		18		

- Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belum tersedia sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
 - Aplikasi yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah yaitu 100% sebagai berikut:

1. Aplikasi "Urus KTP"

"Urus KTP" merupakan inovasi terhadap pelayanan pencetakan KTP elektronik bagi Masyarakat Jombang. Dengan adanya aplikasi "Urus KTP Jombang" yang dapat diunduh di google playstore diharapkan memudahkan penduduk jombang untuk melakukan pengurusan KTP elektronik. Penduduk hanya akan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kecamatan yang ditunjuk pada saat mengambil KTP elektronik tersebut.

Aplikasi ini terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

2. Aplikasi "SiRinduNona"

Sistem Perizinan Terpadu Non Berusaha (SiRinduNona) merupakan aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perijinan non berusaha seperti Surat Izin Praktek (SIP) untuk tenaga kesehatan agar tidak perlu datang dan antri di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP. Masyarakat cukup mengunjungi laman https://perizinan.jombangkab.go.id/ untuk mendapatkan Surat yang dikehendaki. Aplikasi SiRinduNona terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan online.

3. Aplikasi "Pendaftaran Online RSUD Jombang"

Aplikasi Pendaftaran Online RSUD Jombang merupakan fasilitas yang diberikan oleh RSUD Jombang kepada masyarakat yang akan berobat ke poliklinik RSUD yang semula harus mengantri untuk mendaftar di loket pendaftaran, kini cukup melakukan pendaftaran melalui laman https://rsudjombang.jombangkab.go.id/ untuk mendapatkan nomer antrian di poliklinik yang dituju.

Aplikasi "Pendaftaran Online RSUD Jombang" terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) serta terhubung dengan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah

Belum ada perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah, dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang belum memiliki pusat data (data center).

 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

$$\frac{31}{61}$$
 × 100% = 50,82%

DAFTAR SIKLUS PEMBARUAN DATA

ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD) TAHUN 2022

NO	INSTANSI	SIKLUS PEMBARUAN DATA	NAMA APLIKASI
1	2	3	4
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3 Bulan	Aplikasi SIAP ASN
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Bulan	Aplikasi SISMIOP, Aplikasi BPHTB
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Bulan	SIMDA Keuangan, SIMDA Aset, SIMDA Gaji
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6 Bulan	SIPD, Website Berkadang, Website SRA, Website Sinergitas, Website e-Litbang, Aplikasi KRISNA
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Bulan	Sistem Pantauan Hujan, Sistem Pelaporan Kejadian Bencana
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6 Bulan	SIRINDUNONA
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Bulan	JASNITA, Mail Jombangkab, Cloud Jombangkab, Sensus ASN, Website Sigap COVID-19
8	DINAS PERHUBUNGAN	3 Bulan	ATCS, SIKIR ONLINE, SIMOLEN, SIMLLAJ, SIDPJ
9	DINAS PERTANIAN	6 Bulan	Website ADAPTIF, Website SIMFONI
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1 Bulan	E-Katalog Harga Bahan Pokok, Sistem Layanan Tera dan Tera Ulang
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	3 Bulan	Aplikasi Belanja Online UMKM
12	DINAS PEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3 Bulan	Aplikasi Jombang Travel
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Tahun	PPDBSMP, PPDBSD
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Bulan	SISKEUDES
15	DINAS SOSIAL	3 Bulan	SIM-PMKS
16	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 Bulan	Sistem Informasi Aset Tanah

17	DONAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6 Bulan	SIM Pelaporan
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Bulan	Layanan Permohonan SPPL Online
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 Bulan	e-Pusda
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1 Bulan	SIAK, SISCA MANIS, UrusKTP
21	DINAS KESEHATAN	1 Bulan	SIMPUS
22	INSPEKTORAT	1 Bulan	E-AUDIT, SIMHPI, Whistle Blowing System
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG	1 Bulan	Pendaftaran Online
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO	3 Bulan	ArGon
25	KECAMATAN PETERONGAN	6 Bulan	Aplikasi SITAHU-TERONG
26	BAGIAN ORGANISASI	1 Bulan	e-TPP, SIAA, e-SAKIP
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6 Bulan	SIPPEM (e-MONEV)
28	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1 Tahun	Website Sepakat
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	3 Bulan	Aplikasi Pendataan UMKM
30	BAGIAN HUKUM	1 Bulan	Website JDIH
31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1 Bulan	LPSE, SIBAJA, SIRUP
	JUMLAH OPD	31	

Persentase data yang dapat berbagi pakai
$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

DAFTAR DATA BERBAGI PAKAI KABUPATEN JOMBANG Tahun 2022

NAMA DATA	OPD Pengguna Data
Data Kependudukan	Dinas Sosial, DPM-PTSP, RSUD Jombang
Data ASN	Bagian Organisasi

 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city

$$\frac{31}{61}$$
 × 100% = 50,82%

REKAPITULASI DATA INOVASI PENDUKUNG *SMART CITY* PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD) TAHUN 2022

NO	INSTANSI	NAMA INOVASI
1	2	3
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Aplikasi SIAP ASN
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Aplikasi SISMIOP, Aplikasi BPHTB
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SIMDA Keuangan, SIMDA Aset, SIMDA Gaji
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SIPD, Website Berkadang, Website SRA, Website Sinergitas, Website e-Litbang, Aplikasi KRISNA
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sistem Pantauan Hujan, Sistem Pelaporan Kejadian Bencana
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SIRINDUNONA
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JASNITA, Mail Jombangkab, Cloud Jombangkab, Sensus ASN, Website Sigap COVID-19
8	DINAS PERHUBUNGAN	ATCS, SIKIR ONLINE, SIMOLEN, SIMLLAJ, SIDPJ
9	DINAS PERTANIAN	Website ADAPTIF, Website SIMFONI
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	E-Katalog Harga Bahan Pokok, Sistem Layanan Tera dan Tera Ulang
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Aplikasi Belanja Online UMKM

12	DINAS PEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Aplikasi Jombang Travel
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPDBSMP, PPDBSD
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SISKEUDES
15	DINAS SOSIAL	SIM-PMKS
16	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sistem Informasi Aset Tanah
17	DONAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SIM Pelaporan
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Layanan Permohonan SPPL Online
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	e-Pusda
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SIAK, SISCA MANIS, UrusKTP
21	DINAS KESEHATAN	SIMPUS
22	INSPEKTORAT	E-AUDIT, SIMHPI, Whistle Blowing System
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG	Pendaftaran Online
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO	ArGon
25	KECAMATAN PETERONGAN	Aplikasi SITAHU-TERONG
26	BAGIAN ORGANISASI	e-TPP, SIAA, e-SAKIP
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SIPPEM (e-MONEV)
28	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Website Sepakat
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Aplikasi Pendataan UMKM
30	BAGIAN HUKUM	Website JDIH

31 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		LPSE, SIBAJA, SIRUP	
JUMLAH OPD		31	

Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan
 Dinas Kominfo

1/3 ×100% = 33,33%

DATA ASN TENAGA PENGELOLA TIK TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

NAMA	NIP	KETERANGAN
NUR FATIH , S.Kom	19890725 201505 2 001	Sertifikasi
FIRLANA NURDIANSYAH , S.Kom	19830225 201101 1 004	Belum Sertifikasi
LAVANNA INDANUS RAMADHAN, S.Kom.	19960130 201903 1 003	Belum Sertifikasi

Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.

Implementasi e-government tertuang dalam dokumen Masterplan SmartCity, Arsitektur SPBE dan Analisis Strategis SmartCity.

3. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota

REKAPITULASI KOMUNITAS MASYARAKAT/ MITRA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

NO	NAMA KOMUNITAS	STATUS	KETERANGAN
1	PWI Kabupaten Jombang	AKTIF	Persatuan Wartawan Indonesia
2	Jombang Travel	AKTIF	Komunitas Pegiat Pariwisata di Kab. Jombang
3	UKM Jombang	AKTIF	Komunitas UMKM di Kab. Jombang
4	KIM Desa Menturus, Kudu	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Menturus Kecamatan

			Kudu
5	KIM Desa Plandaan, Plandaan	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Plandaan Kecamatan Plandaan
6	KIM Desa Temuwulan, Perak	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Temuwulan Kecamatan Perak
7	KIM Desa Bawangan, Ploso	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bawangan Kecamatan Ploso
8	KIM Desa Pulosari, Bareng	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng
	JUMLAH	8	8

Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)

Jumlah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi komunikasi (STRAKOM)

----- x 100%

Jumlah program dan kebijakan STRAKOM yang dipublikasikan

107 jumlah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi komunikasi (STRAKOM) x 100%

107 jumlah program dan kebijakan STRAKOM yang dipublikasikan

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui portal resmi Jombangkab.

REKAPITULASI KONTEN INFORMASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
1	Januari	18	Website https://jombangkab.go.id/
2	Februari	11	Website https://jombangkab.go.id/
3	Maret	13	Website https://jombangkab.go.id/
4	April	5	Website https://jombangkab.go.id/

5	Mei	3	Website https://jombangkab.go.id/
6	Juni	20	Website https://jombangkab.go.id/
7	Juli	41	Website https://jombangkab.go.id/
8	Agustus	35	Website https://jombangkab.go.id/
9	September	33	Website https://jombangkab.go.id/
10	Oktober	33	Website https://jombangkab.go.id/
11	November	30	Website https://jombangkab.go.id/
12	Desember	30	Website https://jombangkab.go.id/
	JUMLAH	272	

 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui website JDIH dan portal resmi Jombangkab.

REKAPITULASI KEGIATAN DISEMINASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
----	---------------	--------	-----------------

1	Publikasi Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	106	Website https://jdih.jombangkab.go.id/
2	Permintaan Informasi melalui PPID	1	Website https://ppid.jombangkab.go.id/
	JUMLAH	107	

Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah

Belum ada perangkat daerah yang menyimpan pusat data pemerintah, dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang belum memiliki pusat data (data center).

STATISTIK

Outcome:

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Rumus penilaian:

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah penduduk

28.083 peserta dengan sasaran penyebaran informasi publik x 100% = 3% 935.692 jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang

Penyebaran informasi publik dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melalui sosialisasi ke masyarakat sebagai berikut:

DATA PELAKSANAAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

NO	URAIAN	LOKASI	KETERANGAN		
1	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Bidang Cukai	1. Desa Jarak, Kec. Wonosalam	300 orang peserta		
	r crumuling officialingall bloading cultur	2. Desa Karangpakis, Kec. Kabuh			
2	Warung Pojok (WARJOK) Lokal dan	Dilaksanakan sebanyak 3	1200 orang peserta		

	Regional	kali Warjok Lokal dan 2 Kali	
		Warjok Regional	
3	Sosialisasi Lapor SP4N	Jl. KH. Wahid Hasyim 133	150 orang peserta
		(Car Free Day)	
4	Sosialisasi dan Evaluasi SPBE	Dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan	75 orang peserta
5	Sosialisasi Desain Grafis dan Fotografi untuk UKM	Aula Besut Dinas Kominfo	120 orang peserta
6	Sosialisasi Pengelolaan Website Desa	Ruang Bung Tomo dan Ruang Soero Adiningrat	306 orang peserta
7	Sosialisasi Subdomain, Hosting dan Mail	Ruang Soero Adiningrat	103 orang peserta
8	Pengikut di Instagram @jombang_kab	Instagram	11.800 followers
9	Subscriber di Facebook Kabupaten Jombang	Facebook	4.999 subscribers
10	Subscriber di Youtube Jombangkab TV	Youtube	571 subscribers
11	Jangkauan Siaran Radio SJFM di 21	Frekuensi 104.1 FM	7.650 pendengar
	Kecamatan	dan streaming radio online	
12	Seminar Daring <i>Zoom Meeting</i> tentang Vaksinasi	Radio SJFM dan Youtube	809 peserta
	TOTAL		28.083 orang

PERSANDIAN

Output

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Hasil evaluasi telah dijabarkan dalam Buku **Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2021** yang telah diserahkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, adapun hasil evaluasi akhir seperti yang tercantum dalam Buku Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Keamanan Informasi

KATEGORI	SKOR	SKOR MAKSIMAL	TINGKAT KEMATANGAN
Tata Kelola	19	126	I +
Pengelolaan Resiko	17	72	I
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	32	159	I +
Pengelolaan Aset	51	168	I +
Teknologi dan Keamanan Informasi	39	120	II
JUMLAH SKOR	158	645	Tidak Layak

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan informasi infrastruktur teknologi informasi dan ruang server pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang masuk dalam tingkat kematangan "TIDAK LAYAK" dengan skor perolehan 158 dari total skor 645.

Outcome:

 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan.

Belum ada kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal, dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang pengamanan kegiatan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.

Belum ada sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian, dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang penerapan SMKI di lingkup Pemeritah Kabupaten Jombang.

 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

Jumlah nilai per area keamanan informasi
----- x 100%
Jumlah area penilaian

$$\frac{21}{58}$$
 × 100% = 36,21%

Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan.

Belum ada titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS), penetapan titik pada pemerintahan daerah yang harus diamankan.

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2022 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berlangsung cukup baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai mediator masyarakat dengan aparatur dalam penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam penyelenggara penyampaian informasi di pemerintah daerah di berbagai wilayah dituntut untuk lebih produktif, rasional dan mengikuti perkembangan yang ada serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang krusial dalam rangka pengembangan penyampaian informasi, diantaranya:

Form Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

ldentifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis		
1	2	3	4		
Terbatasnya Informasi Publik yang diterima masyarakat	Keterbatasan Akses Informasi yang diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik dan berkualitas	Indeks Kepuasan	Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu		
	Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik	Masyarakat	tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.		
	Pembinaan Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) yang belum optimal				
Masih Rendahnya Pemanfaatan Aplikasi OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Sistem Aplikasi yang dibangun OPD sulit untuk diintegrasikan Belum optimalnya pembangunan / penyediaan jaringan internet dalam		Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif		
	rangka meningkatkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Indeks SPBE			
	Pada saat pembuatan aplikasi tidak berkoordinasi dengan Dinas Kominfo				
Masih rendahnya Indeks SPBE	Komitmen OPD di Lingkungan Pemkab masih kurang khususnya dalam Pelaksanaan SPBE				
	Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal				
Masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi Terbatasnya Tenaga Teknis Untuk Pengamanan	Indeks KAMI BSSN			

	Informasi		
	Antrian penanganan sertifikat elektronik di BSSN		
Kesulitan pengumpulan data sektoral yang ada pada OPD	OPD menunda/ tidak mengirim data sektoral yang diminta		
Inkonsistensi data	Metodologi yang digunakan dan jangka waktu yang dipakai	Deutel Cety Dete	
	Keterbatasan SDM yang baik dari segi jumlah maupun pengetahuan	Portal Satu Data Kabupaten Jombang	
Belum ada standarisasi data dan kualitas analisis data yang belum terjamin	terdapat kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan data yang tersedia		
, ,	perubahan alur pengumpulan data sektoral		

Usaha penanggulangan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah:

- Pengembangan aplikasi teknologi dan informasi guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, dan administrasi. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui *e-government* tanpa harus datang ke kantor dengan memberikan layanan media komunikasi elektronik selain di website juga melalui android dan IOS.
- Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuwan komunikasi dan Informatika
- Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Forum Renja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 tidak terdapat usulan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD lain tidak ada usulan.

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai hubungan nasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
- 2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
- 3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perencanaan progam dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu dan mendukung berjalannya seluruh progam dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi progam dari pusat sampai ke daerah. Sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN 2020-2024 VISI: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi dan Misi Kemenkominfo selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- 2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- 3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- 4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
- 5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- 6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
- 7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- 8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- 10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, meliputi :

- 1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur:
- 2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
- 3. Mengoptimalkan regulasi Pengembangan danPemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah;
- 4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
- 5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur.

VISI Dinas Kominfo Prov. Jawa Timur yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong" dan MISI 3 yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,

Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan mengacu misi ke tiga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup stategis dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1. Menyebarluaskan informasi dengan memanfaatkan TIK;
- 2. Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media
- 3. Mengimplementasikan e-Government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4. Meningkatkan Infrastruktur dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD
- 5. Mewujudkan Satu Data di Jawa Timur

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung progam-progam Bupati Kabupaten Jombang, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada visi dan misi Bupati terpilih.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten, antisipasi dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah. Visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang harus dicapai dalam tahun 2023, untuk itu RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dan visi, misi dan progam Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta RPJM Nasional. Adapun visi Kabupaten Jombang adalah "Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing".

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 3 misi yaitu :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
- 2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
- 3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

Dari semua 3 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Jombang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu misi – 1 yaitu Mewujudkan Tata kelola Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

Berdasarkan 3 misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan visi untuk periode tahun 2018-2023 sebagai berikut:

"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi"

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagaiberikut:

- Penyebaran Informasi memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan institusi yang merumuskan, menyusun, memonitoring, mengevaluasi serta memiliki wewenang untuk menyebarluaskan informasi pembangunan serta kegiatan daerah.
- Pelayanan publik (public service) memiliki maksud bahwaDinas Komunikasi dan Informatika harus mampu memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants),dan harapan (expectation) masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat yang harus di utamakan dan di penuhi adalah kebutuhan akan keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi.

Misi adalah merupakan fondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi (pelaksana) pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap Instansi Pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna mendapatkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan misi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
- 2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kominfo Kabupaten

Jombang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Perubahan Renja Dinas Kominfo Tahun 2022 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Kominfo yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dan Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE.

Sasaran kinerja Dinas Kominfo yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

FORM TUJUAN, SASARAN PERUBAHAN RENSTRA PD TAHUN 2018-2023

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran (IKD)	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Efektif serta	Indeks Good Governance	Meningkatkan kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik bidang Komunikasi dan	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di bidang Komunikasi dan	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	
	Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas			Informatika	Informatika			Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 Indikator)	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 Indikator)	
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Akuntanbilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntanbilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan bagian dari upaya Pemerintah kabupaten Jombang dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan di tahun 2022 yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2018-2023. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 telah disesuaikan dengan Permendagri 90 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaram dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.4 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.4.5 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- 1.4.6 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2.2.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2.2.2 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2.2.3 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Program Informasi dan Komunikasi Publik

- 1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.7.1 Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 1.7.2 Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 1.7.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

- 2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.1.2 Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah
 Daerah

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 2.2.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- 2.2.2 Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- 2.2.3 Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

- 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- 3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

3.1.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1.1 Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Publik tahun 2022 dilaksanakan sebagai berikut:

Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan agar tersampaikannya informasi kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada pedagang rokok eceran, perangkat desa dan masyarakat perokok aktif;
 - Sosialiasi bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok illegal dan penerimaan cukai tembakau yang ilegal dengan target 450 orang dengan narasumber dari Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Kediri.
- Tersosialisasikannya aplikasi LAPOR SP4N kepada masyarakat;
 - LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu. LAPOR! dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan sosialisasi LAPOR SP4N untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan aduan permasalahan atas pelayanan publik.
 - Kegiatan dimaksudkan untuk menjemput informasi atau aduan warga atas pelayanan umum maupun pengaduan warga terhadap fasilitas umum. Selain itu juga mengenalkan pada masyarakat tentang tata cara penyampaian aduan melalui saluran yang benar dan tepat.
- Tersosialisasikan UU informasi publik kepada kepala desa;
 PPID yang ada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama

dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melaksanakan sosialisasi Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui sosialisasi ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat;
- Terlaksananya pembinan Kelompok Informasi Masyarakat kepada pengurus KIM;
- Terlaksananya Warjok lokal (menginformasikan kepada masyarakat kegiatan informasi daerah), bulaga (pelayanan masyarakat) dan publik speaking di sekolah Jombang;

Berdasarkan keterbukaan informasi publik untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program "Warung Pojok" disingkat Warjok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mengadakan rutin kegiatan dialog interaktif dan solutif pada setiap bulannya Kegiatan dialog interaktif dan solutif lokal dikemas dalam perbincangan atau percakapan dengan topik yang dipilih menghadirkan narasumber.

Kegiatan Bupati Layani Warga atau disebut Bulaga merupakan pelayanan gratis kepada masyarakat Diantaranya, berupa cek kesehatan, kemudahan pembayaran pajak serta mendapatkan informasi tentang pajak, pelayanan SIM Keliling dan pembayaran pajak kendaraan, pelayanan warga berupa administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, KTP Elektronik dsb. Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tupoksi melaksanakan penyebaran diseminasi dan pelayanan IT untuk kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.

• Penyebarluasan informasi terkait kegiatan Pemerintah Daerah melalui website Jombangkan dan Kanal resmi media social

Untuk percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menyebarluaskan informasi melalui website jombangkab.go.id, Instagram pemkab Jombang dan channel Youtube Kabupaten Jombang.

• Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana radio dilakukan melalui radio Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Suara Jombang FM (SJFM).

Program siaran radio dengan 7 program perhari melalui SJFM meliputi:

PROGRAM SIAR REGULER RADIO PUBLIK LOKAL SUARA JOMBANG FM 104,1

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
04.00	Opening & Lagu Indonesia Raya	Putar File untuk opening siaran	Рор
04.00- 07.00	-Tartil 'Qur'an, Tarhim, Adzan Shubuh -Kajian Islam Pagi Suara Jombang	Putar File Pengajian KH. Djamaluddin Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Tambakberas Jombang	Religi Islami
07.00- 08.00	Cakrawala sesi I	INFORMASI Siaran kata; Menghadirkan informasi lokal Jombang (politik, ekonomi, sosial, budaya); Mengundang pendengar untuk menyampaikan informasi atau berkomentar baik melalui jalur telepon, WA,atau sms; Konfirmasi dengan narasumber terkait dengan issu lokal yang sedang hangat dibicarakan.	Indonesia pertengahan (rancak)
08.00-	Cakrawala Sesi II	1.INFORMASI perbincangan issu issu nasional	
10.00	Can awara sesi ii	2. TALKSHOW INTERAKTIF	
		Senin : 07.00-08.00 Dinamika Jawa Timur ; Relay Program Asosiali LPPL Jawa Timur 09.00-09.40 Insidental 10.00-11.00 Nasional Is Me ; Relay Program Asosiasi LPPL, Persada.ld Selasa : 09.00-09.40 Talkshow Anti Hoax (MAFINDO Koord. Jombang) 10.00-10.40 PELESIR ; Talkshow Pariwisata bersama BPPD Kab. Jombang Rabu : 09.00-09.40 Pojok Kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Jombang) 11.00-11.40 Talkshow Covid 19 bersama IDI Kab. JOmbang Kamis : 09.00-09.40 Kiat mandiri bersama UMKM dan Enterpreneur Muda Jombang 10.00-11.00 Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit KPC PEN; Persada.ld. Jum'at : 09.00-09.40 Halo Anak; BPPKB-PPPA >>> Membuka line telepon, WA atau SMS untuk interaktif pendengar	Indonesia Pertangahan (boleh slow)
10.00- 12.00	Break In Time	HIBURAN Siaran kata dengan menyisipkan info info ringan seputar	Mancanegara Easy

		lifestyle, selebritis dan info info ringan lainnya.	Listening (Non Hits)
		>> Putar Adzan Dhuhur sesuai dengan jadwal waktu Shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya dengan Hot clock yang ditetapkan	
12.00 – 13.00	Jombang Interaktif	INFORMASI Dibawakan oleh satu orang announcer dibantu oleh dua orang gatekeeper. Menghadirkan tema yang beragam di setiap harinya. Tema diambil dari kebutuhan masyarakat atas informasi maupun pelayanan publik.	Manca – Indo Hits
		Nara sumber dihadirkan melalui wawancara telepon dengan announcer. Jumlah nara sumber menyesuaikan denagn kebutuhan pembahasan tema. Nara sumber diambilkan dari OPD terkait atau lembaga-lembaga swasta yang berwenang untuk memberikan klarifikasi atas suatu masalah, atau berwenang untuk memberikan informasi.	
		Nara sumber sudah dipersiapkan sebelumnya untuk bisa standby dalam rentang waktu antara 12.00 s/d 13.00. Program ini mengundang masyarakat untuk berinteraktif melalui dua jalur (telepon dan WA), untuk memberikan laporan keluhan atau komentar atas tema yang dibahas.	
13.00-	Gayeng Marem	HIBURAN	Gending
15.00		Siaran kata dengan menggunakan bahasa Jawa Jombangan; menemani pendengar beristirahat siang dengan gending dan campur sari; membuka line interaktif dengan	& Campur Sari
		pendengar melalui telepon, WA atau SMS. Informasi terkini lokal/nasional/Internasional (sumber: Detik.com/ Kompas/Liputan6/SS.net ,	
15.00- 17.00	DANSA Dangdut Asyik Suara Jombang	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beraktifitas santai di sore hari' membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Konvensional
17.00- 18.00	Jelang Petang	 Putar File Lagu Putar Adzan Maghrib menyesuaikan dengan jadwal waktu shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya Putar Murattal 	Lagu Religi
18.00- 19.00	Senada indonesia POP	HIBURAN Putar File ; segmentasi anak muda; men ghadirkan tangga nada lagu teratas di setiap minggunya;	Lagu Indonesia HITS
19.00- 21.00	Goyang Dangdut Malam	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beristirahat di malam hari; membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Koplo Terbaru
21.00 – 22.00	Muaik Ingat-Ingat	HIBURAN Putar File ; segmentasi dewasa; men ghadirkan lagu oldies Indonesia; Pengantar istirahat malam	Lagu oldies Indonesia era 70-80an
22.00- 23.00	Ngakak Bareng Kartolo	Putar File Senin – Rabu, Jum'at : Lawakan Kartolo Kamis : Shalawat Minggu : Wayang Kulit	-
22.00	Charles O Law Marile	Putar file lagu untuk closing siaran	
23.00	Closing & Lagu Wajib		
Program PE	Nasional		
Program PE	Nasional		
	Nasional		

30	Info Korupsi KPK
45	Lintas Informasi Nasional

Bidang Aplikasi Teknologi Informasi

- Penyediaan jaringan FO untuk OPD perkotaan maupun jaringan wireless kecamatan untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Pembangunan jaringan FO untuk seluruh OPD milik Pemkab, untuk meningkatkan legalitas penggunaan FO;
- Peningkatan kapasitas jaringan wireless (penggantian perangkat) pada 21 kecamatan dan repeater untuk meningkatkan kapasitas jaringan interner 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Bandwidth sebesar 600 MB untuk client, 200 MB untuk server, dan 200 MB untuk VPN kecamatan. Pada Tahun 2022 Peningkatan kapasitas bandwith untuk client meningkatkan service level agreement (SLA);
- Penyediaan ruang server yang sesuai dengan standart SNI untuk fasilitasi hosting aplikasi pemerintah;
- Integrasi aplikasi pemerintahan dan layanan umum;
- Pengembangan dan pembangunan aplikasi baru untuk mendukung layanan pemerintahan dan layanan umum sebagaimana diamanatkan dalam perpres SPBE.

Bidang Statistik

- Mendorong OPD untuk update data sectoral secara berkala melalui portal satu data Kabupaten Jombang (satudata.jombangkab.go.id);
 - Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan OPD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan data statistik.
- Sistem elektronik yang dilakukan pengamanan informasi

Rincian total kebutuhan dana/pagu indikatif progam dan kegiatan usulan tahun 2022 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3

Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2022

Dinas Kominfo Kabupaten Jombang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Kinerja Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan	Realisasi Kinerja l PD pada	Program dan Ko Renia 2022	eluaran Kegiatan		ahan Target dan Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang		Catatan	
				Dan Program/Kegiatan	(Ouput)	Perangkat Daerah Tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	et Program dan hun Keluaran Kegiatan ir s/d dengan tahun	Target	Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (Sesuai SPD)		2022			
						,		K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.0)1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	200 %	100%	100%	7,212,106,56 7	50%	3.434.412.834	100%	7,821,236,581	-	609,130,014	
2		0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200 %	100%	100%	2,650,000	50%	1,643,750	100%	3,652,100	-	1,002,100	
2		0	2.0 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1,475,000	2 dokumen	800,000	3 dokumen	1,977,100	-	502,100	
2		0	2.0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	10 laporan	5 laporan	5 laporam	1,175,000	2 laporan	843,750	5 Iaporan	1,675,000	-	500,000	
2	-	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	200 %	200%		5,043,116,104	50%	2,227,536,509	100%	5,125,887,318	-	82,771,214	
2		0	2.0 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	28 kali	14 kali		4,831,480,104	9 kali	2,134,245,482	14 kali	4,913,411,318	-	81,931,214	
2	•	0	2.0 0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	22 kegiatan	11 kegiatan		211,356,000	7 kegiatan	93,291,027	11 kegiatan	212,196,000	-	840,000	

	Kode		1	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target	Renja 2022	Renja 2022 Realisasi Tri SPD)	wulan II (Sesuai	Anggaran pada	ahan Target dan 1 Perubahan Renja 2022	Bertambah		Catatan
								K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		0		0 Koordinasi dan 5 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	280,000	0	0	1 dokumen	280,000	-	0	-
2	1 6	0	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	200%	100%	100%	1,000,000,00	50%	799,648,000	100%	799,652,000	-	200,348,000	-
2	1 6	0	2.0 5	1 Sosialisasi Peraturan 0 Perundang-Undangan	Persentase penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	900 orang	450 orang	450 orang	1,000,000,00	450 orang	799,648,000	450 orang	799,652,000	-	200,348,000	-
2		0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200 %	100%	50%	251,851,725	50%	75,520,261	100%	318,618,425	-	66,766,700	-
2	1 6	0	2.0	0 Penyediaan Komponen 1 Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	6 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	13,827,125	3 lokasi	2,451,600	3 lokasi	13,827,125	-	0	-
2	1	0		0 Penyediaan Peralatan dan 2 Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	6 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	64,215,500	3 lokasi	23,373,500	3 lokasi	77,715,500	-	13,500,000	-
2	1	0		0 Penyediaan Bahan 4 Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	4 jenis	2 jenis	2 jenis	113,781,300	2 jenis	27,593,661	2 jenis	114,581,300	-	800,000	=
2		0		0 Penyediaan Barang 5 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	8 jenis	4 jenis	4 jenis	31,094,800	4 jenis	11,330,000	4 jenis	44,143,500	-	13,048,700	-
					Jumlah pemenuhan barang penggandaan	2 jenis	1 jenis	1 jenis		1 jenis		1 jenis		-		-

	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD pada Renja 2022					ahan Target dan Perubahan Renja	Bertambah	Catatan		
				Dan Program/Kegiatan	(Ouput)			Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (Sesuai SPD)		2022					
									K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1 6	0	2.0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	6 media	3 media	3 media	9,916,000	3 media	3,275,000	3 media	9,916,000	-	0	
2	1 6	0	2.0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 kali	3 kali	3 kali	19,017,000	3 kali	7,496,500	3 kali	58,435,000	-	38,418,000	
2	1 6	0	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	200%	100%	100%	547,115,100	100%	245,640,143	100%	602,851,100	-	55,736,000	
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	6 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	228,000,000	3 lokasi	118,667,618	3 lokasi	289,806,000	-	61,806,000	
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	10 jenis	5 jenis	5 jenis	319,115,100	5 jenis	126,972,525	5 jenis	313,045,100	-	6,070,000	
2	1	0	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	200 %	100%	100%	367,373,638	100%	84,424,171	100%	970,575,638	-	603,202,000	
2	1	0	2.0 9	0		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	83,160,000	1 unit	33,341,471	1 unit	83,160,000	-	0	
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	2 unit	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		-		
2	1	0	2.0	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	34 unit	17 unit	17 unit	13,000,000	17 unit	793,000	17 unit	13,000,000	-	0	
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	34 unit	17 unit	17 unit		17 unit		17 unit		-		

	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan	Realisasi Kinerja PD pada	Program dan Ke Renja 2022	eluaran Kegiatan	Usulan Perub Anggaran pada	ahan Target dan Perubahan Renja	Bertambal	Catatan		
				Dan Program/Kegiatan		Perangkat Daerah Tahun 2023 (akhir periode renstra PD)		Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (Sesuai SPD)		2022					
						·		К	Rp. (000)	К	Rp. (000)	К	Rp. (000)	К	Rp. (000)		
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0 2	2.	1 0 0 3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	4 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	83,261,638	2 lokasi	38,769,700	2 lokasi	293,261,638	-	210,000,000	-
2	1 6	0	2.	0 1 9 1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	6 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	187,952,000	3 lokasi	11,520,000	3 lokasi	581,154,000	-	393,202,000	-
2		0 2			PROGRAM INFORMASI Dan komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	123 I-PIKP	81,6 I-PIKP	82 sedang	1,348,453,500	0	901,738,000	82 sedang	3,869,703,500	-	2,521,250,000	-
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	168 IKM	85,81 IKM	84,5 IKM		0	·	84,5 IKM	-	-		-
2		0 2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	200 %	100 %	100%	1,348,453,500	100%	901,738,000	100%	3,869,703,500	-	2,521,250,000	-
2	1	0 2		0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	10 media	5 media	5 media	229,420,400	5 media	86,433,000	5 media	891,270,400	-	661,850,000	-
						Jumlah program siaran radio per minggu	14 program	7 program	7 program		7 program		7 program	-	-	-	-
2	1 6	0 2	2.0	0	Pelayanan Informasi Publik	Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	200 %	100 %	100%	61,868,600	100%	11,536,000	100%	61,868,600	-	0	-
						Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	200 %	100 %	100%		100%		100%		-	-	-
						ditindaklanjuti											

	Kode		de		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Kinerja Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan	Realisasi Kinerja PD pada	Program dan Ke Renja 2022	eluaran Kegiatan		lan Perubahan Target dan aran pada Perubahan Renja		Bertambah/Berkurang		
					Dan Program/Kegiatan	(Ouput)	Perangkat Daerah Tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (Sesuai SPD)		2022					
						,		К	Rp. (000)	K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	К	Rp. (000)			
		1	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	10 desa	5 desa	5 desa		5 desa		5 desa		-		-	
2	1 6	0 2		2.0 1 1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	90 mitra kerjasama	45 mitra kerjasama	45 mitra kerjasama	1,057,164,500	45 mitra kerjasama	803,769,000	45 mitra kerjasama	2,916,564,500	-	1,859,400,000		
						Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	25,000 pengikut	12.000 pengikut	13.000 pengikut		13.000 pengikut		13.000 pengikut		-			
2	1 6	0			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 4	Level 2	Level 2	2,893,203,850	Level 2	315,450,574	Level 2	3,496,508,650	-	603,304,800		
						Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	36 indikator terkelola	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola		18 indikator terkelola		18 indikator terkelola		-			
2	1 6	0 3		2.0	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	200%	100%	100%	1,556,774,100	50%	61,421,774	100%	1,944,434,100	-	387,660,000		
						Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	167%	67%	100%		100%		100%		-			
2	1 6	0 3		2.01 (D Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	107 subdomain	43 subdomain	64 subdomain	31,500,000	64 subdomaia n	0	64 subdomain	281,500,000	-	250,000,000		

	Kode		Pemer	/Bidang Urusan intahan Daerah ogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021			Program dan Keluaran Kegiatan a Renja 2022 Realisasi Triwulan II (Sesuai SPD)		Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 2022		Bertambah/Berkurang		Catatan	
									K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	К	Rp. (000)	К	Rp. (000)	
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1 6	0 3	2.01		nggaraan Sistem n Intra Pemerintah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	136 titik	68 titik	68 titik	1,525,274,100	68 titik	61,421,774	68 titik	1,662,934,100	-	137,660,000	-
2	1	0 3	2.02	Pemerii	olaan e- ment Di Lingkup ntah Daerah nten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	40%	20%	20%	1,336,429,750	20%	254,028,800	20%	1,552,074,750	-	215,645,000	-
2	1 6	0 3	2.02	1 Pengaw governm Penyele Pemerin	aksanaan dan asan e- nent dalam nggaraan itahan Daerah ten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	6 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	57,977,000	2 dokumen	2,665,900	2 dokumen	191,167,000	-	133,190,000	-
2	1 6	0	2.02		laan Pusat Data Itah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	45%	20%	25%	621,995,000	20%	10,112,900	25%	458,495,000	-	(163,500,000)	-
2	1	0	2.02	7 dan Pro	nbangan Aplikasi ses Bisnis ntahan Berbasis nik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	9 aplikasi	5 aplikasi	4 aplikasi	656,457,750	4 aplikasi	241,250,000	4 aplikasi	902,412,750	-	245,955,000	-
2	2	0	0		AM LENGGARAAN TIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	200%	100%	100%	204,499,500	100%	4,438,000	100%	340,727,500	-	136,228,000	-
						Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	7 (baik) IPP	3.164 IPP	3,52 IPP		0		3,52 IPP		-		-
2	2 0	0 2	2.01	Statistil Lingkup	enggaraan k Sektoral di o Daerah iten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	204,499,500	0	2,328,000	3 dokumen	170,221,000	-	34,278,500	-
2	2 0	0 2	2.01		sasi	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	18 kali	9 kali	9 kali	153,073,000	6 kali	2,328,000	9 kali	170,221,000	-	17,148,000	-

	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (akhir periode renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan		Renja 2022	eluaran Kegiatan		pahan Target dan a Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang		Catatan	
				Dan Program/Kegiatan			Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (Sesuai SPD)		2022					
							K	Rp. (000)	К	Rp. (000)	K	Rp. (000)	К	Rp. (000)			
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	0	2.0	11 0	Sektoral Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	56 data sektoral	28 data sektoral	28 data sektoral	51,426,500		2,110,000	28 data sektoral	170,506,500	-	119.080.000	-
2	2	0 2	!		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	75%	50%	75%	68,249,500	0	4,892,000	75%	203,107,400	-	134.857.900	-
2	2 1	3	i		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	75%	50%	75%	68,249,500	0	4,892,000	75%	203,107,400	-	134.857.900-	-
2	2	0 2	2.0	01 0 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	5 sistem elektronik	3 sistem elektronik	2 sistem elektronik	68,249,500	0	4,892,000	2 sistem elektronik	203,107,400	-	134.857.900	-

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2022 dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *Good Governance*.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Jombang, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kominfo ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Jombang, 19 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

BUDI WINARNO, ST. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001